

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Arief, B. N. (1998). *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Jhonny. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group.
- Eryansyah, A. M., & IP, A. M. (2021). *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan terhadap*
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*.
- Febriyanto, P. (2020). *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Bagi Mantan Narapidana Untuk Mendaftar Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS)*.
- Harsono, C. I. (1995). *Sistem baru pembinaan narapidana*. Djambatan.
- Koeswadji, H. H. (1995). *Perkembangan macam-macam pidana dalam rangka pembangunan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Makapuas, N. F. (2019). *Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana Melalui Alat-Alat Bukti Yang Sah Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia*.
- Moeljatno. (1985). *Membangun hukum pidana*. Bina Aksara.
- Peter Mahmud Marzuki. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Priyatno, Dwidja. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia Bandung*: Refika Aditama
- Roeslan, S. (1987). *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sakidjo, A., & Poernomo, B. (1990). *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Samosir, Djisman. (2001). *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Setiady, T. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta.
- Simarmata, B. (2011). *Pemberian remisi terhadap narapidana koruptor dan teroris*. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Sudaryono, S., & Surbakti, N. (2017). *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*.
- Syamsudin, Muhammad. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Triasmi, T. Y. (2020). *Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana Rehabilitasi Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Surabaya*.

B. Jurnal

- Afra, Randi Pratama. dan Butar-butur, Herry Fernandes. (2021). *Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995*. Menara Ilmu, Vol.15.2, hlm 62-68.
- Harahap, Hairul Azhari. (2022). *Analisis Yuridis Mengenai Pembebasan Bersyarat Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam*. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, Vol.9 No 2, hlm 1984.
- Jufri, E. A., & Anisariza, N. U. (2017). *Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta*.
- Khomaini, Khomaini, Hambali Thalib, and Muhamamd Syarief Nuh. "Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2.2 (2021): 415-431.

- Oksep Adhayanto, Irman, Dwi Vita Lestari Soehardi. (2021). '*Rekam Jejak Narapidana Sebelum Masuk Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Tanjungpinang*', Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, Vol 9. Issue 1.
- Putra, Aan Riana Angkasa Aji, and Ningrum Puspita Sari. "*Kendala Pemberian Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen.*" *Recidive* 2.3 (2013).
- Redha Wiradinata, 2015, *Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak*, Jurnal Gloria Yuris, Volume 4, Nomor 1.
- Rusydi, Y. (2021). *Pengawasan terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 A Pakjo Palembang.*
- Situmorang, V. H. (2019). *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian dari Penegakan Hukum.* Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.13.1, hlm 85-98.
- Ulandari, Devi. (2021). *Dampak Atas Overkapasitas Pada Lapas Tangerang Dalam Pemenuhan Hak Narapidana Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 1995 (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang).* Jurnal Hukum Adigama, Vol.4 No 2. hlm 4507-4529.
- Wiradinata, R. (2015). *Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Pontianak.*
- Yudistira Distri. (2021). *Pengawasan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 A Pakjo Palembang.* Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.16 (2), hlm 231-246.

C. Skripsi

- Akrimi Zulfaneli. (2019). *Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi Komparatif antara Hukum positif dan Hukum Islam).* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Viki Irwanto, (2021). *Efektivitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Lapas Klas IIA Jambi)*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

D. Peraturan PerUndang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 65)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 356).

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bebas Bersyarat. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 117).

